

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 bank syariah mulai dikenal oleh masyarakat luas meskipun bank syariah telah hadir sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Krisis moneter mengakibatkan kehancuran bagi bank konvensional namun bank syariah tetap mampu bertahan dalam krisis moneter tersebut sehingga membuat pemerintah memberikan dukungan terhadap eksistensi bank syariah dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, bank umum diberikan kesempatan untuk menjalankan *dual banking system* atau yaitu kebebasan untuk menyelenggarakan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah).² Setelah diberlakukannya Undang-Undang ini seakan memberikan kabar baik bagi perkembangan bank syariah. Bank konvensional mulai

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998> (Pada Tanggal 06 Januari 2021 Pukul 08.15 WIB)

² Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> (Pada Tanggal 06 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB)

berlomba-lomba dalam menghadirkan bank dengan sistem syariah yang menyebabkan jumlah bank syariah di Indonesia terus bertambah.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Aset	DPK	Pembiayaan
2013	242.276	183.534	184.122
2014	272.343	217.858	199.330
2015	296.262	231.176	212.996
2016	356.504	279.335	248.007
2017	424.181	334.888	285.695
2018	477.327	371.828	320.193
2019	524.564	416.558	355.182
2020	593.948	465.977	383.944

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 yang diterbitkan OJK, diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia juga telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dilihat dari beberapa indikator kinerja keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, selama tahun 2013 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan secara terus-menerus pada indikator Aset, DPK, dan Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.

DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah sudah cukup terlembagakan dengan baik. Dana Pihak Ketiga sangat mempengaruhi pertumbuhan aset, bank sangat mengandalkan sumber dana tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila DPK semakin besar, maka akan semakin besar pula dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan akan mempengaruhi pertumbuhan aset. Kemudian peran perbankan syariah menyalurkan DPK dalam bentuk pembiayaan juga menunjukkan bahwa

permintaan likuiditas perbankan syariah semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ketiga indikator tersebut bank syariah di Indonesia telah mampu menunjukkan sistem pengelolaan aset, DPK dan pembiayaan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2020

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	11	12	12	13	13	14	14	14
UUS	23	22	22	21	21	20	20	20
BPRS	163	163	163	166	167	167	164	163

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 yang diterbitkan OJK, diolah.

Selain itu pertumbuhan bank syariah juga terlihat pada jumlah Bank Umum Syariah yang terus bertambah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 1.2. Terutama semenjak pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pengembangan dan pertumbuhan dengan salah satu cara yaitu memberikan izin kepada Bank Konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) dan melakukan *spin off* atau dengan konversi bank konvensional ke bank syariah.

Berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa industri perbankan syariah nasional bersaing secara ketat, khususnya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, dimana perkembangan perbankan syariah tidak hanya terkait masalah besaran jumlah aset, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan, tetapi juga terkait pertumbuhan jumlah Bank Syariah selama rentang waktu dan kinerja bank tersebut.

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memberikan konsekuensi persaingan yang ketat bagi industri perbankan. Persaingan tidak

terjadi pada bank konvensional dan bank syariah saja, namun juga terjadi antar sesama bank konvensional dan sesama bank syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Permasalahan penting yang menyangkut bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari bank syariah yang ada yang membuat para pemangku kepentingan harus lebih teliti dalam memilih bank syariah yang memiliki kualitas kinerja terbaik dengan cara melihat kondisi keuangan bank tersebut. Mengetahui kondisi keuangan bank sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan bank tersebut, seperti investor, masyarakat, pemodal asing maupun Bank Indonesia sebagai pengawas bank untuk mengevaluasi kinerja bank dalam mengelola usahanya.

Tabel 1.3
Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2020

Tahun	FDR (%)	NPF (%)	BOPO (%)
2013	100	2,22	74,97
2014	195,68	7,5	177,16
2015	192,91	7,87	180,42
2016	182,69	7,91	179,07
2017	179,04	6,88	169,06
2018	181,75	5,41	164,56
2019	179,84	6,13	162,46
2020	172,37	6,14	164,51

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020 yang diterbitkan OJK, diolah.

Disamping kinerja perbankan syariah jika dilihat dari indikator DPK, aset dan pembiayaan serta jumlah perbankan syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal ini tidak mengindikasikan bahwa Bank Syariah sudah efisien. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1.3 jika dilihat dari indikator NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan

bermasalah masih mengalami peningkatan dan tidak berubah secara signifikan di angka 6,14%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat permasalahan pembiayaan perbankan syariah semakin tinggi, yang menunjukkan kinerja perbankan syariah semakin buruk dalam mengelola risiko penyaluran pembiayaan macet. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah pembiayaan itu sendiri. Hal ini disebabkan saat terjadi pembiayaan bermasalah maka dana perbankan syariah tidak dapat diputar dari satu nasabah ke nasabah lainnya.

Pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank harus menyiapkan dana penghapusan yang lebih besar sehingga dapat menurunkan minat bank untuk menyalurkan dana melalui pembiayaan. Semakin besar rasio pembiayaan macet pada suatu bank maka secara otomatis akan mengganggu kegiatan operasional bank, terutama dari segi likuiditas bank tersebut. Maka hal tersebut akan menyebabkan suatu bank menjadi tidak efisien dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki. Bank Indonesia menjelaskan bahwa kinerja bank dapat dikatakan baik apabila perbankan memiliki tingkat NPF dibawah 5 persen.³

Selain itu pula indikator Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga seringkali mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa bank masih mengalami pemborosan dalam kegiatan operasionalnya. Rika Lidyah (2016) menyebutkan bahwa rasio yang besar mencerminkan bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya

³ Bank Indonesia : Kajian Stabilitas Keuangan No.10, Maret 2008. hlm. 30

operasional. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%. Karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan.⁴

Pengukuran efisiensi dan determinan atau faktor-faktor menjadi hal yang sangat penting agar perusahaan tersebut dapat mengevaluasi, meminimalisir kesalahan dan menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Dari fenomena di atas tentunya perbankan syariah perlu melakukan analisis efisiensi secara berkala atau periodik.

Sebagaimana Abidin dan Endri (2009) menyebutkan salah satu aspek penting bagi keberhasilan suatu perusahaan adalah efisiensi. Efisiensi tidak hanya menekan biaya serendah mungkin tetapi menyangkut pengelolaan hubungan antara input dan output yaitu bagaimana mengelola faktor-faktor produksi (input) sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil (output) yang optimal. Suatu perusahaan akan dianggap lebih efisien apabila dengan

⁴ Rika Lidyah, "Dampak Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance 2, no. 1 (2016): 1–19.

tingkat input tertentu dapat menghasilkan output lebih banyak atau pada tingkat output tertentu bisa menggunakan input lebih sedikit.⁵

Selain itu, untuk menghasilkan profit yang diharapkan, perusahaan perlu mengelola sumber daya yang digunakan secara efisien. Pengelolaan sumber daya juga akan berkaitan dengan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses menghasilkan keuntungan. Apabila perusahaan berada pada kondisi yang tidak efisien, maka sumber daya yang digunakan akan semakin besar. Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Salah satunya adalah penelitian oleh Fadilah (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada perbankan syariah Go Public berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*).⁶

Begitu pula dengan bank sebagai lembaga keuangan, untuk dapat mencapai keberhasilan dan memperoleh profit yang diharapkan ditengah tingkat persaingan yang tinggi maka penting sekali untuk dapat memperhatikan efisiensinya. Suseno (2008), menyatakan bahwa efisiensi merupakan akar permasalahan kesehatan dan sumber pertumbuhan perbankan. Fenomena munculnya bank-bank besar dan merger perbankan juga ditujukan untuk mendapatkan efisiensi.⁷

⁵ Abidin, Zaenal, dan Endri. “*Kinerja Efisiensi Teknik BPD : Pendekatan Data Envelopment Analysis*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 11, No. 1, 2019 hlm. 4

⁶ Fadilah, Mukh Rizal H. Skripsi “*Pengaruh Tingkat Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 112

⁷ Suseno, P. “*Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2 (1): 29-47 2008. hlm 31

Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kinerja yang baik. Efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapinya. Pengukuran efisiensi dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dan menghadapi persaingan pada industri perbankan syariah maupun industri perbankan nasional. Menurut Iswardono dan Darmawan menyatakan bahwa efisiensi perbankan dirasakan penting saat ini maupun masa mendatang, karena (1) kompetisi yang semakin ketat, (2) permasalahan yang timbul sebagai akibat berkurangnya sumber daya, (3) meningkatnya standar kepuasan nasabah.⁸ Dengan kata lain, efisiensi menjadi penting untuk sebuah bank, selain untuk memperlihatkan bahwa bank tersebut sehat atau tidak, memperlihatkan kinerja sebuah bank dalam menggunakan input – inputnya untuk menghasilkan output yang maksimal, tetapi juga dapat menarik investor khususnya masyarakat untuk menginvestasikan dananya serta menjadikan bank tersebut lebih kompetitif di pasarnya.

Selain itu, pengukuran efisiensi (*performance measurement*) merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem lembaga keuangan tersebut, karena lembaga keuangan memiliki fungsi yang strategis dalam perekonomian. Oleh karena itu analisa efisiensi perbankan akan sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara baik secara mikro (internal) maupun secara makro (ekternal). Astiyah S. dan

⁸ Wilson Arafat, “*Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*”. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia) hlm. 134

Husman A. (2006) juga menjelaskan bahwa efisiensi bank bukan hanya sebagai indikator penting dalam perbankan, tetapi juga sarana penting untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Perbankan yang efisien diperkirakan dapat memperlancar proses transmisi kebijakan moneter, sehingga kebijakan moneter dapat lebih efektif mencapai sasaran.⁹

Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan bank termasuk tingkat efisiensi lembaga perbankan dengan melihat laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dari laporan keuangan bank dapat dihitung menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi tingkat keuntungan, prediksi masa depan dan mengantisipasi masa depan. Namun menurut Weetman (2003) dalam Putri dan Lukviarman (2008) penggunaan rasio keuangan melalui proses akuntansi menuai kritikan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dan validitas hasil rasio keuangan melalui perbandingan dua perusahaan yang relatif berbeda.¹⁰ Menurut Darwis (2009) Rasio-rasio tersebut memang bisa memberikan informasi yang penting mengenai kinerja keuangan, namun memiliki keterbatasan, dikarenakan rasio tersebut belum bisa memberikan informasi komprehensif untuk manajemen dalam rangka perbaikan kinerja dan belum bisa mempertimbangkan nilai dari keputusan investasi yang diambil.¹¹ Oleh

⁹ Astiyah, S. dan Husman, A. J. “*Fungsi Intermediasi dalam Efisiensi Perbankan di Indonesia: Derivasi Fungsi Profit.*” Paper dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan pada bulan Maret 2006, (Jakarta: Bank Indonesia). hlm. 58

¹⁰ Putri, Vicky Rahma, dan Niki Lukviarman. “*Pengukuran Kinerja Bank Komersial Dengan Pendekatan Efisiensi: Studi Terhadap Perbankan Go Publik Di Indonesia.*” Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 12 (1) 2008:37–52.

¹¹ Herman Darwis, “*Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan.*” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.13 No.3. September 2009 131-145

karena itu, dalam mengevaluasi kinerja bank terutama efisiensi bank dapat digunakan pendekatan yang lainnya.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan yaitu pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA) dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan non-parametrik dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Menurut Hadad (2003) dalam Rakhmat Purwanto (2011), analisis evaluasi efisiensi perbankan tepat apabila menggunakan pendekatan parametrik atau non-parametrik. Hal ini dikarenakan kemampuan kedua metode tersebut yang dapat memasukkan berbagai macam input dan output ke dalam analisisnya. Selain itu perbedaan satuan variabel pun tidak menjadi masalah, dimana hal tersebut sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh alat analisis yang lain sehingga alat analisis efisiensi dengan pendekatan parametrik dan non-parametrik sifatnya lebih fleksibel dan dapat mencakup variabel yang lebih luas dibandingkan dengan alat analisis yang lain.¹²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non-parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini memiliki kelebihan yaitu tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi produksi dalam membentuk *frontier* produksinya, oleh karena itu kesalahan dalam spesifikasi

¹² Rakhmat Purwanto, Skripsi “*Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2006-2010.*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011) hlm 19

fungsi produksi dapat dieliminasi. DEA merupakan sebuah metode non-parametrik yang menggunakan model program linear untuk menghitung perbandingan rasio *input* dan *output* untuk semua unit atau *Decision Making Unit* (DMU) yang dibandingkan. Manfaat dari pengukuran efisiensi dengan DEA adalah sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

Alasan pemilihan metode DEA pada penelitian ini menurut Nenovsky, dkk., (2008), DEA lebih kompleks dan metode canggih daripada yang tradisional, karena merupakan pendekatan non-parametrik deterministik, dengan menggunakan beberapa input dan output. Kekuatan utama dari DEA adalah objektivitas, yakni DEA memberikan peringkat efisiensi berdasarkan data numerik; DEA dapat menangani beberapa input dan beberapa output, dan dapat diukur dalam satuan yang sangat berbeda; dan DEA adalah non-parametrik dalam arti tidak memerlukan asumsi bentuk fungsional yang berhubungan input ke output. DEA banyak digunakan dalam manajemen, terutama isu efisiensi karena perubahan dalam manajemen didominasi oleh isu bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan sumber daya yang terbatas.¹³ Demikian juga penggunaan DEA cukup meluas pada penelitian

¹³ Nenovsky, dkk., "Approach And Data Envelopment Analysis, Agency for Economic Analysis and Forecasting" Working Paper Series 97068532 ISBN 978-954-567-060-2 2008, hlm. 15

efisiensi perbankan, menurut Yudhistira, (2003) metodologi DEA telah banyak digunakan dalam literatur perbankan.¹⁴

Penggunaan metode DEA lebih banyak digunakan dalam mengestimasi efisiensi perbankan, disamping kemampuannya untuk mengelola beberapa karakteristik bank, yang menggunakan beberapa input dan output. Sejalan dengan diatas, bahwa DEA lebih menarik, karena DEA memiliki potensi untuk memberikan informasi penting tentang kondisi keuangan bank dan kinerja manajemen untuk kepentingan regulator bank, manajer dan investor saham perbankan. Selain itu, DEA hanya membutuhkan data tentang jumlah input dan output, data harga ada atau tidak diperlukan. Hal ini terutama menarik dalam analisis perbankan karena kesulitan yang melekat dalam mendefinisikan dan mengukur harga input dan output bank. Selain itu, metode DEA sangat fleksibel.¹⁵

Selanjutnya pengukuran efisiensi dengan metode non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) menggunakan pendekatan intermediasi, dimana pendekatan ini memandang sebuah lembaga keuangan bank syariah sebagai intermediasi, yaitu merubah dan mentransfer aset-aset financial dari unit-unit defisit. Pertimbangan lainnya menggunakan pendekatan intermediasi adalah karakteristik dan sifat dasar bank syariah yang melakukan transformasi aset dari dana pihak ketiga yang dihimpun menjadi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Selain itu, pendekatan intermediasi merupakan pendekatan yang

¹⁴ Yudhistira, D. "Efficiency in Islamic Banking an Empirical Analysis of 18 Banks." Proceeding of Islamic Conference on Islamic Banking, Jakarta. 2003 hlm. 10

¹⁵ Jaelani, Disertasi "Studi Efisiensi Bank Umum Di Indonesia Tahun 2002 – 2013 (Komparasi Faktor-Faktor Penjelasa Efisiensi Antara Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah)", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2015) hlm. 112

lebih tepat untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan secara umum karena karakteristik lembaga keuangan sebagai *financial intermediation*.¹⁶

Dalam pendekatan intermediasi, sederetan variabel input yang dimiliki oleh bank akan ditransformasi menjadi berbagai bentuk output yang dihasilkan dari input-input yang ada sebelumnya. Proses transformasi bentuk input menjadi output pada pendekatan intermediasi ini terkait fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*). Dari berbagai pilihan input yang ada, dalam penelitian ini hanya digunakan tiga variabel input yaitu dana pihak ketiga, aset dan biaya tenaga kerja serta dua variabel output yaitu pembiayaan, dan pendapatan operasional. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada pendekatan intermediasi yang digunakan. Adapun proses transformasi variabel input yang dipilih menjadi bentuk output menurut pendekatan intermediasi ini adalah bahwa seberapa besar fungsi intermediasi bank terlihat dari seberapa besar jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun oleh bank (dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah) untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah).

Biaya tenaga kerja sebagai pelaku dan merupakan sumber daya input yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank karena tenaga kerja sebagai ukuran biaya dari operasionalisasi bank. Selain pembiayaan sebagai output, pendapatan operasional lainnya juga ditempatkan sebagai output yang akan dimaksimalkan Bank selain bertujuan untuk menghasilkan

¹⁶ Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, “Analisis Perbandingan Efisiensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)”, (E-journal, Vol.II, No.3, 2007), hlm 89-90

keuntungan dari peranannya sebagai lembaga intermediasi. Selain menghimpun dan menyalurkan bank juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pembayaran yang menyediakan jasa-jasa pembayaran. Atas jasa-jasa pembayaran yang diberikan, bank mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh bank selain pendapatan dari pembiayaan riil (seperti keuntungan pembiayaan di sektor non riil) juga ditempatkan sebagai output.¹⁷

Persaingan pada perbankan syariah dapat juga dilihat dari ekspansi bisnis yang dilakukan bank tersebut menjadi bank devisa, yaitu bank yang tidak hanya melayani transaksi dalam negeri tetapi juga mampu melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa terbukti mampu menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang statusnya masih non devisa.

Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank umum syariah yang telah menjadi bank devisa sejak tahun 2008 setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri mendeklarasikan sebagai bank devisa. Terbukti Bank Mega Syariah telah berhasil mencapai predikat sebagai bank syariah yang memiliki aset terbesar ketiga pada tahun 2012 setelah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Aset Bank Mega Syariah mengalami peningkatan sebanyak 49% dari Rp 5,5 triliun menjadi Rp 8,2 triliun. Bank Syariah Mandiri memiliki aset terbesar pertama sebesar Rp 54,2 triliun sedangkan Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di

¹⁷ Zakiatun Nisak, Skripsi “*Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*”. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) hlm 10

Indonesia ternyata hanya menempati posisi kedua dari segi kepemilikan aset yaitu sebesar Rp 44,9 triliun.

Pencapaian aset tertinggi kerap dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri secara bergantian namun baik Bank Mega Syariah maupun BRI Syariah juga merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang memiliki aset terbesar. Aset yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah merupakan salah satu indikator bahwa keempat bank tersebut mampu menunjukkan kinerja yang baik dari segi aset. Kemudian pada awal tahun 2021, dilakukan merger 3 bank menjadi Bank Syariah Indonesia, 3 bank syariah tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Maka dari itu dari keempat bank dengan aset besar tersebut peneliti memilih 2 bank yang tidak termasuk ke dalam merger Bank Syariah Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah.

Penelitian ini memilih dua bank syariah tersebut sebagai objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah dengan melihat periode laporan keuangan triwulan sejak tahun 2013-2020. Tujuan dari pemilihan objek kedua bank tersebut untuk melakukan perbandingan efisiensi bank syariah. Perbandingan efisiensi dalam industri perbankan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perbankan. Hasil perbandingan tersebut akan sangat berguna dan bisa dijadikan acuan untuk pihak-pihak terkait. Metode yang dipakai untuk melakukan perbandingan efisiensi antara Bank

Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah adalah *Uji Wilcoxon Signed Rank Test*.

Penelitian ini juga didasari dengan adanya *research gap* pada dua penelitian tentang analisis efisiensi bank syariah yang dilakukan pertama oleh Putri Monica Sari, Moh. Bahrudin, dan Gustika Nurmalia (2020). Penelitian yang dilakukannya adalah tentang efisiensi perbankan syariah dengan metode DEA dan SFA pada 4 bank umum syariah devisa yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil pengujian menggunakan metode DEA dan SFA antara keempat bank tersebut.¹⁸ Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Harjum Muharam dan Pusvitasari (2007) yang meneliti tentang efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan metode DEA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai efisiensi yang signifikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik membahas tingkat efisiensi perbankan syariah dengan judul “**Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah Periode 2013-2020)**”.

¹⁸ Putri Monica Sari, dkk, “*Studi Komparatif Analisis Efisiensi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Antara Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Analysis (SFA)*”, (Jurnal Fidusia: Volume 3, Nomor 1, April 2020) hlm. 63

¹⁹ Harjum Muharam dan Rizki Pusvitasari, “*Analisis Perbandingan Efisiensi bank Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)*”, (E-journal, Vol.II, No.3, 2007), hlm 110

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2020?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Bank Mega Syariah periode 2013-2020?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah periode 2013-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efisiensi Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2020 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Mengetahui tingkat efisiensi Bank Mega Syariah periode 2013-2020 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
3. Mengetahui adakah perbedaan tingkat efisiensi antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Mega Syariah selama periode 2013-2020 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai efisiensi kinerja bank syariah di Indonesia serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam memilih bank syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang efisiensi kinerja suatu perbankan atau instansi dengan variabel yang berbeda serta sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi suatu perbankan khususnya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah terhadap langkah perbaikan kinerja perbankan agar dapat meningkatkan atau mempertahankan tingkat efisiensi untuk periode selanjutnya.